

RINGKASAN

Studi ini merupakan suatu kajian tentang sistem politik tradisional di Irian Jaya, Indonesia. Perhatian utama diberikan pada pendiskripsian tentang tipe-tipe kepemimpinan politik, bentuk-bentuk organisasi dan proses-proses kepemimpinan yang diwujudkan oleh berbagai golongan etnik Irian di Irian Jaya.

Langkah pertama yang ditempuh penulis untuk mencapai maksud tersebut adalah menginventarisasi tipe-tipe sistem politik yang terdapat di antara orang Irian. Bertalian dengan itu penulis membedakan adanya empat tipe sistem kepemimpinan politik di Irian Jaya, ialah sistem kepemimpinan *big men* atau pria berwibawa, sistem kerajaan, sistem *ondoafi* atau kepala suku dan sistem percampuran. Langkah berikut yang dilakukan adalah mendeskripsi tiap tipe sistem politik yang didukung oleh satu atau beberapa suku-bangsa yang berbeda meliputi struktur-struktur organisasi kepemimpinan dan proses-proses kepemimpinan. Selanjutnya membandingkan unsur-unsur yang sama atau berbeda dalam tipe sistem politik yang sama tetapi didukung oleh suku-suku-bangsa yang berbeda. Langkah terakhir adalah mencoba mencari faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya persamaan atau perbedaan unsur itu. Di samping deskripsi khusus tentang tipe-tipe sistem politik di Irian Jaya, dalam bagian akhir studi ini penulis melakukan suatu tinjauan terhadap teori-teori kepemimpinan yang telah dikembangkan di Oseania berdasarkan data etnografi dari Irian Jaya yang disajikan dalam studi ini.

Alasan mengapa studi seperti ini penting untuk dilakukan, penulis jelaskan dalam butir satu di bab satu. Ada dua alasan umum yang dikemukakan, alasan pertama adalah alasan teori sedangkan alasan kedua adalah alasan praktis. Kategori alasan teori terdiri dari tiga buah alasan. Alasan pertama adalah latar belakang pemilihan unsur politik sebagai tema kajian. Mendasarkan diri pada pokok-pokok pemikiran A. Cohen (1969) seperti yang diuraikan dalam butir satu di bab satu tentang keterkaitan yang sangat erat antara unsur-unsur politik, ekonomi, kekerabatan dan simbolisme dalam suatu kebudayaan tertentu serta peranan "dominan" unsur politik dalam kehidupan bermasyarakat, penulis memilih unsur politik sebagai tema kajian dengan harapan tema tersebut dapat berfungsi sebagai "pintu masuk", untuk memahami kebudayaan-kebudayaan di Irian Jaya pada umumnya dan khususnya untuk lebih baik memahami sistem-sistem kepemimpinan politik tradisional yang diwujudkan oleh tiap kelompok etnik di Irian Jaya. Pemahaman demikian penting sebab dapat dijadikan dasar untuk

mengerti tingkah laku politik orang Irian dalam sistem politik modern pada masa sekarang.

Alasan kedua, adalah langkanya penggunaan data etnografi dari daerah Irian Jaya dibandingkan dengan penggunaan data etnografi dari daerah-daerah lain di Oseania untuk membentuk teori sistem kepemimpinan yang bukan saja mempunyai relevansi di regio Oseania saja tetapi juga mempunyai relevansi global. Kurangnya penggunaan data etnografi dari Irian Jaya disebabkan terutama oleh masih sedikitnya studi dalam bidang tersebut di Irian Jaya. Alasan ketiga yang berkaitan dengan alasan kedua bersifat alasan metodologis. Bahwa, penggunaan data etnografi untuk pembentukan teori tentang sistem kepemimpinan di Oseania dianggap tidak representatif sebab tidak mewakili semua masyarakat atau kebudayaan di Oseania, terutama dari daerah Irian Jaya yang didiami oleh penduduk yang beranekawarna kebudayaannya dengan kurang lebih 250 bahasa itu. Kajian ini merupakan suatu upaya untuk mengisi kekosongan tersebut.

Kategori alasan umum lain yang disampaikan dalam bab satu adalah alasan praktis. Bahwa dalam rangka membuat keputusan-keputusan penting yang menyangkut pembangunan masyarakat di suatu daerah yang baru dibangun, sebagai contoh seperti masyarakat di daerah Irian Jaya, adalah perlu bagi para pembuat kebijaksanaan untuk mendasarkan keputusan-keputusannya atas pengetahuan mereka tentang kebudayaan masyarakat setempat. Misalnya pengetahuan tentang bentuk-bentuk serta proses-proses kepemimpinan yang diwujudkan oleh masyarakat tertentu. Pengetahuan tentang hal seperti ini penting sebab dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijaksanaan dalam rangka membuat berbagai program pembangunan.

Untuk memperoleh berbagai keterangan yang relevan serta menganalisis data secara terarah penulis memilih dua buah pendekatan untuk memandu penulis dalam kajian ini. Alasan pemilihan dan uraian tentang kedua pendekatan itu dilakukan dalam butir dua, bab satu. Dua pendekatan itu adalah pendekatan struktural-fungsionalisme dan pendekatan proses. Pemilihan dua pendekatan itu didasarkan atas pertimbangan kekurangan pada satu pendekatan dapat diisi oleh kelebihan pada pendekatan yang lain. Pendekatan struktural-fungsionalisme digunakan terutama untuk mengkaji bentuk-bentuk atau tipe-tipe politik sedangkan pendekatan proses digunakan untuk mengkaji mekanisme kerja dalam sistem politik tertentu. Bertalian dengan itu dalam pendekatan struktural-fungsionalisme, konsep-konsep yang dijadikan konsep analisis adalah kesatuan-kesatuan sosial seperti masyarakat, tribe, klen dan kategori-kategori sosial seperti misalnya umur atau kedudukan sosial (Lewellen 1983:90). Sebaliknya dalam pendekatan proses, konsep-konsep yang dijadikan alat analisis adalah konsep proses,

arena, medan (*field*), dukungan, sumberdaya, keabsahan, kepentingan umum, kekuasaan konsensus dan kekuasaan koersif (Claessen 1988:39).

Selanjutnya dalam butir tiga, bab satu, dijelaskan kerangka teori kepemimpinan yang diajukan oleh Koentjaraningrat (1984, 1990) yang penulis gunakan sebagai kerangka acuan dalam kajian ini. Dalam bagaian akhir bab satu dijelaskan cara atau metode yang digunakan untuk menjaring data. Keterangan-keterangan yang digunakan untuk menulis karangan ini penulis peroleh melalui pengumpulan data di lapangan (pada berbagai tempat di Irian Jaya) selama kurang lebih satu tahun lamanya, dari bulan Juni 1989 hingga Mei 1990. Kecuali data yang dikumpulkan pada periode tersebut, data tambahan diperoleh dari berbagai penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis sendiri di berbagai tempat di Irian Jaya tahun-tahun sebelumnya. Juga keterangan lain yang sangat relevan bagi penulisan ini penulis peroleh dari berbagai karangan etnografi, laporan-laporan perjalanan, ekspedisi-ekspedisi ilmiah dan laporan-laporan tentang daerah dan penduduk Irian Jaya yang dilakukan oleh para peneliti lain maupun petugas-petugas pemerintah dan petugas-petugas dari instansi-instansi swasta yang tersimpan dalam berbagai perpustakaan baik di negeri Belanda (Perpustakaan KITLV di Leiden, Algemeen Rijksarchief di Den Haag, Universiteit Bibliotheek di Leiden), maupun di Indonesia, khususnya di daerah Irian Jaya (Perpustakaan Universitas Cenderawasih dan Perpustakaan Pemerintah Daerah di Jayapura).

Sebelum penulis mendeskripsi tipe-tipe sistem politik di Irian Jaya, penulis memberikan pada bab dua suatu uraian umum tentang daerah dan penduduk Irian Jaya. Pertama-tama digambarkan corak-corak alamiah daerah Irian Jaya meliputi letak geografi, ciri-ciri fisiografi, keadaan iklim dan lingkungan-lingkungan alam utama berdasarkan vegetasinya. Keterangan-keterangan tentang keadaan alam ini penting sebab dapat memberikan gambaran kepada kita tentang corak-corak lingkungan alam yang menjadi tempat tinggal dan yang sekaligus mempengaruhi pola-pola kehidupan orang Irian.

Selanjutnya dalam bab dua digambarkan pula keanekaragaman penduduk Irian Jaya yang tercermin dalam berbagai unsur budaya meliputi bahasa, struktur-struktur organisasi sosial, sistem-sistem kepemimpinan, agama dan sistem matapencaharian hidup berdasarkan mintakad ekologi daerah Irian Jaya. Juga dalam bab ini disajikan keadaan demografi penduduk Irian Jaya meliputi jumlah dan persebarannya. Selanjutnya, diberikan suatu uraian tentang proses perkembangan kebudayaan di daerah ini dengan menggunakan keterangan-keterangan arkeologi dan prehistori sebagai sumber acuan untuk melacak kembali siapa dan sejak kapan pulau New Guinea

dijadikan tempat tinggal orang. Berdasarkan keterangan-keterangan arkeologi yang ada, diperkirakan penduduk pertama di pulau New Guinea adalah dari ras Oseanik Negritos yang berkebudayaan neolitik, yang menduduki pulau tersebut kurang lebih 40.000-25.000 tahun yang lalu (Birdsell 1977:179; Golson 1976; 1985:308). Golongan penduduk kedua yang datang kemudian di pulau New Guinea adalah orang Proto-Polinesia, mereka datang ke New Guinea kurang lebih 4.000 tahun yang lalu. Golongan penduduk ketiga yang datang kurang lebih 2.000 tahun yang lalu adalah penduduk yang mendukung kebudayaan dongson atau kebudayaan perunggu. Sisa-sisa kebudayaan-kebudayaan tersebut terdapat pada berbagai situs di Irian Jaya. Baik golongan pertama, kedua, maupun ketiga diperkirakan datang dari arah sebelah barat pulau New Guinea, yaitu dari daerah kepulauan Indonesia.

Berdasarkan keterangan-keterangan itu dapat disimpulkan bahwa penduduk Irian sekarang adalah keturunan dari salah satu ras atau percampuran dari dua atau tiga golongan penduduk tersebut. Demikian pula aneka warna kebudayaan yang didukung oleh berbagai golongan etnik di Irian Jaya sekarang merupakan hasil proses perkembangan kebudayaan-kebudayaan dari golongan-golongan penduduk yang datang ke pulau New Guinea ribuan tahun yang lalu itu.

Selanjutnya dalam bab dua dijelaskan pula kontak penduduk Irian dengan dunia luar. Sejarah kontak penduduk Irian Jaya dengan dunia luar dibagi dalam tiga periode. Periode pertama adalah periode antara abad ke delapan sampai abad ke-16. Kontak-kontak yang terjadi pada periode ini merupakan kontak perdagangan yang terjadi antara penduduk Irian Jaya dengan penduduk dari daerah lain di kepulauan Indonesia. Keterangan tertulis tentang adanya kontak yang terjadi pada waktu itu dimuat antara lain dalam sumber dari kerajaan Sriwijaya tahun 724 A.D. dan dalam sumber kerajaan Majapahit pada abad ke-14 (Krom 1926:120; Rouffaer 1915).

Periode kedua adalah periode antara abad ke-16 hingga abad ke-19. Kontak pada periode ini terjadi antara penduduk Irian dengan orang Eropa. Kontak pada periode ini terjadi melalui kegiatan eksplorasi dan perdagangan orang Eropa ke berbagai tempat di Asia, Afrika, Oseania dan Amerika. Meskipun terjadi kontak namun kontak yang terjadi itu tidak membawa pengaruh penting bagi orang Irian baik dilihat dari kepentingan ekonomi maupun politik, sebab daerah Irian merupakan daerah periferi dalam berbagai kegiatan orang Eropa selama periode itu. Periode ke tiga adalah periode antara abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Kontak yang terjadi pada periode ini penting sebab membawahkan pengaruh besar dalam tatanan kehidupan dan kebudayaan orang Irian baik dilihat dari segi ekonomi, politik maupun keagamaan. Dalam bidang politik, kontak

tersebut membawa perubahan-perubahan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat orang Irian melalui pasifikasi oleh pax neerlandika. Hal itu ditandai oleh proklamasi tanggal 24 Agustus 1828 yang menyatakan daerah Irian Jaya sebagai bagian resmi dari pemerintah Hindia Belanda. Sejak itulah orang Irian dimasukkan ke dalam sistem pemerintahan kenegaraan modern, walaupun pelaksanaannya baru terjadi pada akhir abad ke-19. Pada periode inilah dilakukan berbagai upaya untuk memperluas kekuasaan pemerintah Belanda melalui pengangkatan petugas-petugas pemerintah baik di tingkat kampung, distrik, keresidenan maupun pusat. Hasil dari usaha yang berlangsung selama periode itu ialah pada akhir tahun 1950-an Irian Jaya merupakan wilayah jajahan pemerintah Belanda yang dikepalai oleh seorang Gubernur yang membawahi enam orang Residen, masing-masing berkuasa atas suatu wilayah keresidenan dan di bawahnya terdapat sejumlah *onderafdeling*, masing-masing dikepalai oleh seorang *HPB* (*Hoofd van Plaatselijk Bestuur* atau Kepala Pemerintahan Setempat) dan di bawah masing-masing *onderafdeling* terdapat sejumlah distrik dengan kepala seorang Kepala Distrik. Selanjutnya di bawah distrik terdapat sejumlah kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala kampung. Perkembangan pemerintahan modern yang dasar-dasarnya diletakkan oleh pemerintah Belanda itu diteruskan oleh pemerintah Indonesia ketika pemerintah Republik Indonesia mengambil alih kekuasaan atas daerah Irian Jaya dari pemerintah Belanda melalui pemerintahan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1963. Dalam struktur pemerintahan sekarang daerah Irian Jaya dijadikan Daerah Tingkat I dengan status propinsi dan merupakan propinsi ke 26 dari negara Republik Indonesia. Propinsi Irian Jaya yang dikepalai oleh seorang gubernur dibagi atas sembilan kabupaten atau Daerah Tingkat II dan satu kota madya. Masing-masing kabupaten dikepalai oleh seorang bupati sedangkan kota madya dikepalai oleh seorang wali kota. Selanjutnya masing-masing kabupaten terbagi ke dalam sejumlah wilayah kecamatan dan di bawah kecamatan terdapat desa-desa untuk daerah pedesaan dan sejumlah kelurahan untuk daerah perkotaan. Masing-masing wilayah kecamatan itu dikepalai oleh seorang Camat, sedangkan desa dikepalai oleh seorang kepala desa dan kelurahan dikepalai oleh seorang lurah. Di seluruh Irian Jaya terdapat 117 Kecamatan, 841 desa dan 66 kelurahan (Lavalin International 1987:44).

Dalam bidang keagamaan, pada periode tersebut para penginjil dan misionaris dari agama Kristen baik dari gereja-gereja Protestan maupun dari gereja Roma Katolik yang berpusat di Eropa, terutama dari negeri Belanda dan Jerman, melakukan berbagai kegiatan pengkristenan di daerah Irian Jaya. Kegiatan tersebut berlangsung terus hingga

pada saat sekarang. Hasil dari usaha-usaha pengkristenan itu ialah mayoritas penduduk Irian Jaya pada waktu sekarang memeluk agama Nasrani.

Deskripsi tentang tipe-tipe sistem politik tradisional di Irian Jaya dimulai pada bab tiga. Bab tiga sendiri terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama memuat uraian tentang asal mula konsep *big man* atau pria berwibawa, pengertian tentang sistem kepemimpinan pria berwibawa dan tipe-tipe pemimpin pria berwibawa di Irian Jaya. Bagian kedua mendeskripsi tipe-tipe kepemimpinan pada lima suku-bangsa yang dijadikan contoh dalam kajian ini. Sedangkan bagian ketiga merupakan analisa perbandingan antara tipe-tipe kepemimpinan pada lima suku-bangsa yang dijadikan contoh itu.

Dalam bagian pertama bab tiga, diuraikan secara singkat sejarah asal usul konsep *big men* atau pria berwibawa yang berkembang dari kata bahasa sehari-hari menjadi konsep ilmiah untuk menamakan para pemimpin tradisional pada berbagai masyarakat di Oseania, terutama di wilayah kebudayaan Melanesia. Konsep *big man* atau pria berwibawa digunakan untuk satu bentuk atau tipe kepemimpinan politik yang diciri oleh kewibawaan (*authority*) atas dasar kemampuan pribadi seseorang untuk mengalokasi dan merealokasi sumber-sumber daya yang penting untuk umum (Sahlins 1963; Claessen 1984).

Juga dalam bagian pertama bab tiga dibahas ciri-ciri yang dijadikan tolok ukur untuk menggolongkan seorang pemimpin masyarakat ke dalam kategori pemimpin yang disebut *big man* atau pria berwibawa. Ciri utama yang dipakai untuk membedakan tipe kepemimpinan *big man* atau pria berwibawa dari tipe-tipe kepemimpinan lain adalah bahwa kedudukan pemimpin pria berwibawa didapat melalui prestasi perorangan, jadi kedudukan itu bersifat *achievement* atau pencapaian. Berbeda dengan sistem kepemimpinan lain yang biasanya kedudukan pemimpin diperoleh melalui *ascribement* atau pewarisan.

Ciri lain yang juga dijadikan tolok ukur untuk membedakan sistem kepemimpinan pria berwibawa dari sistem-sistem kepemimpinan lain ialah dalam sistem pria berwibawa tidak terdapat suatu badan organisasi dengan pembagian fungsi antara pemimpin dan para pembantu. Dalam sistem kepemimpinan pria berwibawa terdapat hanya satu orang pemimpin saja, tidak ada wakil atau pembantu. Seluruh pemerintahan dijalankan oleh hanya satu orang saja, ialah sang pemimpin. Demikian pula banyak keputusan penting yang menyangkut kepentingan masyarakat dibuat oleh pemimpin sendiri, meskipun demikian nasihat atau usul dari tokoh-tokoh masyarakat lain tetap dijadikan pokok pertimbangan bagi pengambilan keputusan. Oleh karena keputusan-

keputusan yang diambil itu selalu dianggap benar dilihat dari segi kepentingan umum, maka pemimpin yang membuat keputusan itu adalah individu dengan kemampuan pengetahuan yang melebihi kemampuan rata-rata penduduk lainnya. Hal inilah yang menyebabkan seorang pemimpin pria berwibawa dijuluki dengan berbagai nama seperti misalnya *a well-rounded political expertise man* atau seorang ahli politik sejati (Epstein 1972:42) dan *an autonomous leader* atau pemimpin tunggal (Read 1959:425).

Bertalian dengan prinsip pencapaian kedudukan pada sistem kepemimpinan pria berwibawa itu adalah bahwa seseorang yang menjadi pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang biasanya diharapkan dari seorang pemimpin pria berwibawa adalah kekayaan, keberanian dan pandai berpidato serta bermurah hati. Syarat kekayaan itu berwujud keberhasilan dalam usaha ekonomi tertentu, seperti berhasil dalam sistem tukar menukar (misalnya memiliki banyak kulit kerang atau *kain timur*), berhasil dalam pertanian dan peternakan (misalnya memiliki banyak kebun dan banyak babi) dan kawin dengan banyak isteri. Syarat keberanian dan kepandaian berpidato yang dituntut dari seorang pemimpin pria berwibawa harus diwujudkan dalam bentuk berani memimpin perang dan berani serta pandai menyampaikan pendapat di muka umum. Selanjutnya syarat bermurah hati harus diwujudkan dalam bentuk kerelaan membantu warga masyarakat yang tidak mampu misalnya memberikan bantuan makanan atau bantuan harta benda kepada warga masyarakat yang memerlukan bantuan.

Mengingat ciri-ciri umum yang dikemukakan di atas itu tidak sama dalam urutan prioritasnya di antara masyarakat-masyarakat pendukung sistem kepemimpinan pria berwibawa itu, maka penulis membedakan kepemimpinannya pria berwibawa atas dua tipe. Tipe pertama adalah kepemimpinan pria berwibawa yang mendasarkan kekuasaannya atas kemampuan berwiraswasta. Sedangkan tipe kedua adalah kepemimpinan pria berwibawa yang mendasarkan kekuasaannya atas kemampuan memimpin perang.

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam bagian pertama di atas, maka dalam bagian kedua bab tiga ini dideskripsikan contoh-contoh dari tipe-tipe kepemimpinan pria berwibawa itu. Contoh untuk tipe pertama, ialah tipe kepemimpinan pria berwibawa yang mendasarkan kekuasaannya atas kemampuan berwiraswasta diambil dari tiga golongan etnik, ialah orang Meybrat, orang Me dan orang Muyu. Selanjutnya contoh untuk mendeskripsikan tipe kedua, tipe kepemimpinan pria berwibawa yang mendasarkan kekuasaannya atas keberanian memimpin perang, diambil dari dua golongan etnik, ialah orang Asmat dan orang Dani.

Dalam deskripsi kepemimpinan pria berwibawa pada tiap golongan etnik tersebut, selalu diawali dengan suatu uraian sosio-etnografi umum yang singkat tentang daerah dan masyarakat yang bersangkutan sebagai latar belakang. Sedangkan dalam bagian khusus yang membahas sistem kepemimpinan, perhatian diberikan terutama kepada faktor-faktor yang dijadikan sumber pengabsahan serta proses-proses kekuasaan.

Demikianlah pada orang Meybrat perhatian utama diberikan kepada sistem tukar-menukar *kain timur* serta proses-proses untuk mencapai kedudukan *bobot* atau pemimpin masyarakat. Dalam kebudayaan orang Meybrat, orang-orang yang dapat tampil menjadi pemimpin dalam masyarakat adalah para individu yang berhasil melakukan transaksi pertukaran *kain timur*. Sistem pertukaran *kain timur* memainkan peranan penting dalam berbagai aspek kebudayaan orang Meybrat, seperti misalnya dalam aktivitas perekonomian, dalam institusi perkawinan, dalam upacara-upacara religius dan dalam aspek politik.

Dari segi perekonomian, *kain timur* merupakan benda bernilai sebab dapat dijadikan alat bayar atau dengan kata lain mempunyai fungsi seperti uang, sedangkan dari segi institusi perkawinan *kain timur* penting sebab merupakan harta untuk membayar mas kawin. Selanjutnya dari segi religius *kain timur* penting sebab merupakan unsur penting dalam upacara pembayaran tengkorak yang merupakan media untuk berkomunikasi dengan dunia roh nenek moyang. Kecuali itu dari segi politik, *kain timur* penting sebab dapat meningkatkan prestise seseorang di muka umum.

Contoh lain untuk mendeskripsikan tipe kepemimpinan pria berwibawa yang didasarkan atas kemampuan berwiraswasta adalah orang Me. Seorang pemimpin, *tonowi*, pada orang Me adalah orang yang dapat memenuhi syarat-syarat dasar seperti kaya, bermurah hati, jujur, pandai berdiplomasi dan pandai berpidato (Pospisil 1963:48). Syarat kaya dinyatakan dalam bentuk memiliki banyak kebun, banyak kulit bia (*mege*), banyak babi dan banyak isteri. Syarat bermurah hati dinyatakan dalam bentuk rela memberikan bantuan kepada kaum kerabat yang memerlukan pertolongan. Syarat pandai berdiplomasi dan pandai berpidato dinyatakan dalam bentuk kependaian bernegosiasi dengan pihak lain, pandai menyampaikan pendapat di muka umum dan bijaksana dalam membuat keputusan-keputusan yang menyangkut perselisihan antar individu dalam kelompok sendiri.

Golongan etnik ketiga yang dijadikan contoh untuk menggambarkan tipe kepemimpinan pria berwibawa yang mendasarkan kekuasaannya atas kemampuan berwiraswasta adalah orang Muyu. Bertalian dengan itu uraian-uraian pokok diberikan kepada faktor-faktor yang dijadikan syarat dasar untuk mencapai kedudukan pemimpin,

kayepak. Seperti halnya pada dua golongan etnik yang telah dibicarakan sebelumnya, pada golongan etnik Muyu syarat dasar utama yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah faktor kemampuan pribadi.

Di samping kemampuan-kemampuan seperti pandai berdiplomasi, pandai berpidato, memiliki pengetahuan tentang alam atas, dan sifat bermurah hati, faktor kemampuan pribadi yang amat penting bagi orang Muyu adalah kemampuan untuk menyelenggarakan suatu pesta babi. Hal ini dianggap sangat penting sebab pesta babi mempunyai banyak fungsi. Pertama, merupakan arena persaingan untuk menunjukkan kehebatan seseorang. Kedua, merupakan tempat terjadi bermacam-macam hubungan sosial (hubungan kerabat, hubungan pertemanan), dan transaksi perdagangan (Schoorl 1957; 1993; Haan 1955). Ketiga, pesta babi berfungsi sebagai upacara pemakaman kedua dan oleh karena itu merupakan media untuk melakukan hubungan baik dengan dunia roh nenek moyang. Hubungan baik demikian penting untuk dipelihara sebab ketidakpedulian manusia terhadap dunia roh nenek moyang dapat berakibat buruk bagi manusia yang masih hidup. Mengingat berbagai fungsi penting dari pesta babi menyebabkan bahwa dalam kebudayaan orang Muyu, individu-individu yang berambisi untuk menjadi pemimpin harus membuktikan kemampuan kepemimpinannya melalui penyelenggaraan suatu pesta babi.

Deskripsi lebih lanjut adalah tentang tipe kepemimpinannya pria berwibawa yang mendasarkan kekuasaannya atas keberanian memimpin perang. Contoh untuk mendeskripsikan tipe kepemimpinan ini diambil dari dua suku-bangsa, ialah orang Asmat dan orang Dani.

Dalam deskripsi tentang tipe kepemimpinan itu pada orang Asmat, perhatian pokok diberikan kepada uraian tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi pemimpin, *tesmaypits*. Syarat utama yang dibicarakan adalah sifat keberanian dari seseorang. Sifat tersebut dinyatakan dalam bentuk menyampaikan pendapat di muka umum dan pernah membunuh sejumlah orang musuh. Orang yang pernah membunuh beberapa orang dari pihak musuh tetapi tidak berani mengadu pendapat di muka umum tidak diakui sebagai pemimpin. Demikian pula seseorang yang berani menyampaikan pendapat tetapi belum pernah membunuh seorang musuh tidak disegangi dan tidak diakui sebagai pemimpin.

Syarat lain yang dituntut dari seseorang pemimpin adalah pandai mengatur siasat serangan terhadap musuh dan pandai membangkitkan semangat tempur anak buah. Kecuali itu syarat lain yang penting juga adalah memiliki kekuatan magis. Orang Asmat percaya bahwa seseorang dapat berhasil untuk memimpin perang karena mendapat

bantuan dari kekuatan-kekuatan alam. Sifat keberanian yang dijadikan syarat utama bagi seorang pemimpin itu penting sebab melalui keberanian seseorang dapat memimpin ekspedisi perang untuk membunuh musuh. Di satu pihak perang penting sebab melalui perang terjadi penguasaan terhadap wilayah tertentu yang menjadi sumber tempatpencaharian hidup. Kedua korban-korban musuh dalam perang digunakan untuk upacara-upacara penting seperti inisiasi dan upacara penyuburan hutan sagu.

Deskripsi selanjutnya adalah tentang sistem kepemimpinan pria berwisata yang mendasarkan kekuasaannya atas keberanian memimpin perang pada orang Dani. Dalam hubungannya dengan itu perhatian pokok diberikan kepada uraian tentang syarat-syarat untuk mencapai kedudukan pemimpin, *kain*, dalam berbagai kesatuan wilayah yang dikenal orang Dani. Orang Dani mengenal adanya empat kesatuan wilayah, urutan kesatuan-kesatuan wilayah itu dari kecil ke besar adalah: kompleks (*uma*), gabungan kompleks (*o-ukul*), wilayah bertetangga (*ap-logalek*) dan konfederasi. Orang Dani mengenal juga aliansi tetapi aliansi bukan merupakan kesatuan wilayah sebab tidak bertahan lama dibandingkan dengan kesatuan-kesatuan wilayah lain tersebut di atas (Hieder 1979:62). Di tiap kesatuan wilayah terdapat seorang pemimpin yang disebut dengan nama yang sama, ialah *kain*. Di samping syarat-syarat bermurah hati dan pandai berorganiasi, syarat utama yang dituntut dari seorang pemimpin *kain*, baik pada kesatuan wilayah terkecil yang disebut kompleks (*uma*) maupun pada kesatuan-kesatuan wilayah yang lebih besar adalah syarat keberanian. Sifat keberanian itu dinyatakan dalam hal berani menyampaikan pendapat di muka umum, pandai berpidato dan berani dalam perang. Syarat yang disebut terakhir adalah syarat terpenting dan harus dinyatakan dalam bentuk pernah membunuh orang lain dari pihak musuh. Tuntutan terhadap syarat ini menyebabkan bahwa seseorang pemimpin pada tingkat *uma* tertentu yang lebih sukses dalam perang dibandingkan dengan pemimpin pada beberapa *uma* lain dapat menjadi pemimpin untuk gabungan beberapa *uma* yang disebut *o-ukul*, yang bisa disamakan dengan desa. Wewenang dan kekuasaan terpenting dari seorang *kain* pada tingkat *uma* adalah mengatur pemanfaatan tanah milik *uma*. Sebaliknya wewenang dan kekuasaan seorang pemimpin pada tingkat *o-ukul* adalah mengatur masalah-masalah penting yang menyangkut kehidupan politik, ekonomi dan agama antar warga desanya.

Demikian pula seorang pemimpin *o-ukul* yang lebih menonjol dapat menjadi pemimpin untuk gabungan beberapa *o-ukul* yang disebut *ap-logalek*. Wewenang dan kekuasaan seorang pemimpin pada *ap-logalek* adalah sama dengan yang terdapat pada tingkat *o-ukul*, namun jangkauan kekuasaannya lebih besar sebab meliputi warga dari

beberapa *o-ukul*. Selanjutnya pemimpin *ap-logalek* tertentu yang lebih menonjol dari pemimpin-pemimpin *ap-logalek* lain dapat menjadi pemimpin bagi gabungan sejumlah *ap-logalek* yang dapat disamakan dengan konfederasi. Orang Dani tidak mempunyai nama untuk menyebut konfederasi, mereka menamakan konfederasi menurut nama klen-klen besar dari mana para pemimpin berasal, sebagai contoh adalah konfederasi Wilihiman-Walalua. Nama tersebut berasal dari empat nama klen besar, ialah klen Wilil, klen Himan, klen Walilo dan klen Alua. Peranan utama dari seorang pemimpin, *kain*, pada tingkat konfederasi adalah memimpin perang dan mensponsori penyelenggaraan pesta babi. Implikasi dari sistem kepemimpinan yang mendasarkan kekuasaannya atas keberanian berperang seperti tersebut di atas adalah bahwa seseorang yang mempunyai keberanian serta kekuatan fisik yang melebihi orang-orang lain dapat menjadi pemimpin baik pada tingkat *uma* maupun pada tingkat konfederasi. Sifat keberanian yang ditunjukkan oleh seseorang dalam tindakan membunuh lebih dari seorang musuh dalam perang dinilai tinggi oleh orang Dani sebab berhubungan erat dengan upacara pesta babi besar yang hanya dapat dilakukan sesudah upacara pembakaran korban-korban musuh. Upacara pesta babi besar penting bagi orang Dani sebab merupakan media untuk di satu pihak memperkuat solidaritas kesatuan sosial kelompok dan pada pihak yang lain merupakan tempat untuk melakukan transaksi pertukaran benda-benda penting yang tidak terdapat dilingkungan sendiri (Heider 1970:129-130; Berndt 1964:14).

Bagian ketiga dalam bab tiga berisi suatu analisa perbandingan. Analisa perbandingan dilakukan untuk memperoleh suatu pengertian yang komprehensif tentang sistem kepemimpinan pria berwibawa di Irian Jaya. Untuk mencapai maksud tersebut analisis dilakukan dalam dua tingkat yang berbeda. Tingkat analisis pertama adalah membandingkan unsur-unsur yang sama dan yang tidak sama pada tipe sistem politik pria berwibawa tertentu. Pada tingkat analisis kedua dijelaskan faktor-faktor yang merupakan mekanisme pendorong untuk menjadikan unsur kekayaan atau berani berperang menjadi orientasi hidup.

Analisa pada tingkat pertama tentang sistem kepemimpinan pria berwibawa yang mendasarkan kekuasaannya pada kemampuan berwiraswasta pada tiga suku-bangsa (orang Meybrat, orang Me dan orang Muyu) menunjukkan bahwa orientasi hidup mereka sama, yakni mencari kekayaan, sehingga syarat-syarat yang dituntut dari seseorang yang hendak menjadi pemimpin itu sama, namun skala prioritasnya tidak sama pada ketiga suku-bangsa. Pada orang Meybrat unsur kepandaian melipatgandakan keuntungan (mendapatkan bunga yang sebesar-besarnya) dalam sistem tukar menukar berupacara *kain timur* menduduki urutan sangat penting bila dibandingkan dengan dua

suku-bangsa lain yang mengenal sistem pertukaran juga tetapi menggunakan jenis benda lain (kulit bia, *coury shell*), syarat tersebut hanya menduduki urutan penting dalam skala prioritas. Syarat keberhasilan dalam usaha tani pada orang Me menduduki urutan sangat penting dalam skala prioritas sedangkan pada orang Muyu dan Meybrat syarat tersebut penting tetapi tidak mutlak. Selanjutnya syarat keberhasilan dalam usaha beternak babi merupakan syarat sangat penting bagi orang Muyu dan orang Me bila dibandingkan dengan orang Meybrat. Sebaliknya syarat bermurah hati yang berimplikasi moral pada orang Me dinilai sangat penting bila dibandingkan dengan orang Meybrat dan orang Muyu. Demikian pula syarat pengetahuan magis menduduki urutan sangat penting dalam skala prioritas pada orang Muyu dan orang Meybrat sedangkan pada orang Me syarat tersebut hanya menduduki urutan penting saja. Perbedaan lain adalah bahwa para pengikut seorang pemimpin pria berwibawa pada orang Meybrat dan orang Me melembaga sedangkan pada orang Muyu hal itu tidak terdapat.

Lebih lanjut, dalam tipe sistem kepemimpinan pria berwibawa yang mendasarkan kekuasaannya atas keberanian memimpin perang pada orang Asmat dan orang Dani terlihat bahwa selain syarat berani memimpin perang, terdapat perbedaan prioritas pada syarat-syarat lain yang dituntut dari seorang pemimpin. Pada orang Dani syarat kekayaan (banyak babi dan kebun dan kulit bia) menjadi sangat penting, sedangkan pada orang Asmat kekayaan bukan merupakan syarat sangat penting dalam skala prioritas. Selanjutnya syarat bermurah hati pada orang Asmat tidak menduduki urutan sangat penting seperti halnya pada orang Dani. Sebaliknya syarat pengetahuan magis pada orang Asmat sangat penting dibandingkan dengan orang Dani.

Analisa pada tingkat kedua tentang faktor-faktor yang merupakan mekanisme dasar untuk memilih kekayaan pada orang Meybrat, orang Muyu dan orang Me menunjukkan bahwa mekanisme dasar yang merupakan pendorong untuk berorientasi kekayaan pada orang Meybrat dan orang Muyu sangat erat berkaitan dengan sistem kepercayaan roh nenek-moyang. Sebaliknya pada orang Me, mekanisme dasar terletak pada tuntutan terhadap kohesi sosial yang menurut pandangan orang Me harus diupayakan oleh manusia sendiri dan bukan oleh bantuan kekuatan alam atas.

Selanjutnya dalam bagian yang memuat tentang mengapa orang Asmat dan orang Dani menjadikan sifat keberanian memimpin perang sebagai orientasi hidup, dijelaskan bahwa pada orang Dani, selain kepentingan ekonomi, kepentingan kohesi sosial merupakan daya penggerak utama bagi orang Dani untuk memilih orientasi tersebut. Selanjutnya dalam analisa ditunjukkan bahwa mekanisme pendorong pada orang Asmat

untuk memilih orientasi berani memimpin perang adalah kebutuhan intensifikasi upacara inisiasi dan kepentingan ekonomi.

Dalam bab empat dibahas tipe sistem kepemimpinan *ondoafi* atau kepala suku. Ciri-ciri utama sistem kepemimpinan *ondoafi* adalah, pertama, posisi atau kedudukan pemimpin diperoleh melalui pewarisan atau merupakan status perolehan (*ascribed status*). Kedua, sistem kepemimpinan *ondoafi* mengenal suatu badan organisasi yang terdiri dari seorang kepala dan dibantu oleh sejumlah para pembantu. Seperti halnya kedudukan pemimpin kepala, kedudukan para pembantu juga bersifat pewarisan dan di antara para pembantu terdapat pembagian tugas yang jelas. Sistem kepemimpinan *ondoafi* dipraktikkan oleh sembilan suku-bangsa, semuanya terdapat di daerah timur laut Irian Jaya yang sekarang merupakan bagian dari Kabupaten Jayapura.

Meskipun terdapat variasi-variasi tertentu dalam sistem kepemimpinan *ondoafi* di antara suku-suku-bangsa yang mengenal sistem tersebut, namun dalam kajian ini penulis memilih satu suku-bangsa saja, ialah orang Sentani, sebagai contoh untuk mendeskripsikan sistem kepemimpinan tersebut. Bertalian dengan itu penulis memberikan suatu gambaran sosio-etnografi tentang daerah dan penduduk Sentani sebagai latar belakang pengkajian, meliputi keadaan lingkungan alam, keadaan demografi penduduk, sejarah penduduk setempat, asal usul nama 'sentani', sistem mata pencaharian hidup, sistem kepercayaan asli dan struktur sosial. Selanjutnya perhatian utama penulis beriklan pada deskripsi tentang aspek-aspek struktur organisasi pemerintahan, fungsi para petugas, pergantian kepemimpinan dan sumber-sumber kekuasaan.

Deskripsi tentang sistem kepemimpinan *ondoafi* menunjukkan bahwa struktur organisasi dalam sistem *ondoafi* terdiri dari tiga tingkat. Pertama adalah organisasi dalam tingkat klen kecil. Setiap klen kecil mempunyai seorang pemimpin yang disebut *khoselo* dan dibantu oleh dua orang pembantu masing-masing adalah *abu-akho* atau pelaksana ritus dan *akhona-fafa* atau bendahara. Tugas seorang *khoselo* adalah bertindak sebagai hakim untuk mengurus dan memutuskan perkara-perkara yang menyangkut para warganya, memimpin upacara adat atau ritus, mengurus perkawinan dan mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi para warganya. Tugas seorang *abu-akho* atau pelaksana ritus adalah membantu *khoselo* untuk mengatur persiapan dan penyelenggaraan suatu pesta adat, termasuk mengurus jenazah *khoselo* dan upacara pemakaman jika *khoselo* meninggal dunia. Tugas seorang *akhona-fafa* atau bendahara adalah menyimpan semua harta kekayaan kelompok.

Bentuk organisasi yang kedua adalah organisasi yang terdapat pada tingkat kampung. Biasanya tiap kampung dibentuk oleh beberapa klen kecil. Masing-masing klen kecil mempunyai seorang kepala yang disebut *khoselo*, sedangkan kepala untuk semua warga yang berasal dari klen-klen kecil yang berbeda tetapi bergabung dalam satu kampung disebut *jo ondoafi* atau biasanya disingkat saja *ondoafi*. Dalam struktur organisasi tingkat kampung, seorang *ondoafi* dibantu oleh perangkat pembantu khusus yang disebut *abu-afa* dan suatu staf perangkat yang terbagi dalam empat bidang ketatalaksanaan. Perangkat pembantu khusus terdiri dari dua orang, seorang bertugas sebagai bendahara kampung dan yang seorangnya lagi bertugas sebagai wakil *ondoafi*, sedangkan keempat bidang itu adalah bidang religi (*pulo-yo*), bidang keamanan (*phuyo-ayo*), bidang kemakmuran (*phume-ameyo*) dan bidang ketertiban (*yomme-yammeyo*). Pada tiap bidang bertugas satu atau beberapa orang fungsionaris. Misalnya dalam bidang kesejahteraan terdapat enam fungsi yang dilaksanakan oleh enam orang fungsionaris, ialah fungsionaris yang mengatur dan mengawasi kegiatan meramu sagu, disebut *fi-yo*; fungsionaris yang mengatur dan mengawasi penangkapan ikan di perairan danau, disebut *buyo-kayo*; fungsionaris yang mengatur dan mengawasi perburuan di hutan, disebut *yayo*; fungsionaris yang mengatur dan mengawasi pemanfaatan hasil-hasil hutan, disebut *aniyo-erayo*; fungsionaris yang membantu dan mengobati orang sakit, disebut *buroyo*. Para fungsionaris itu terdiri dari para *khoselo* atau kepala-kepala klen kecil.

Di samping ke empat bidang ketatalaksanaan tersebut di atas, terdapat juga dalam organisasi tingkat kampung satu badan dewan adat, disebut *yonow* atau *aranggae*. Fungsi dewan adat adalah sebagai tempat membicarakan semua urusan dan persoalan penting yang menyangkut kehidupan masyarakat sebelum dibuat keputusan. Keanggotaan dewan adat terdiri dari *ondoafi* dan para *khoselo* atau kepala-kepala klen kecil.

Wewenang seorang *ondoafi* amat luas karena meliputi semua bidang kehidupan dalam kampungnya mencakup bidang-bidang keagamaan, perekonomian, kesejahteraan sosial, keamanan dan peradilan.

Bentuk organisasi lain di atas tingkat kampung adalah konfederasi. Suatu konfederasi merupakan gabungan dari beberapa kampung yang penduduknya mempunyai latar belakang asal-usul dari moyang yang sama. Kepala dari satu konfederasi disebut *Hu Ondoafi* atau *Iwa-iwa Ondoafi* yang berarti *ondoafi* besar. Di seluruh Sentani terdapat lima konfederasi, masing-masing dengan seorang pemimpin *Hu Ondoafi*. Kedudukan *Hu Ondoafi* dijabat oleh *ondoafi* dari kampung tempat asal

moyang pertama yang sekaligus berperan sebagai pusat persebaran bagi kampung-kampung lain dalam konfederasi tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya baik yang bersifat urusan intern, maupun urusan antar konfederasi, seorang pemimpin *Hu Ondoafi* dibantu oleh dua orang pembantu. Tugas utama seorang *Hu Ondoafi* pada waktu lampau adalah misalnya memimpin upacara inisiasi bagi pemuda-pemuda dari kampung-kampung yang berada di bawah kekuasaannya, memimpin perang melawan konfederasi lain dan mengangkat *ondoafi* baru. Di waktu sekarang tugas lebih terbatas pada hal-hal yang menyangkut urusan persengketaan yang timbul antar kampung karena masalah pelanggaran susila atau masalah pertanahan yang timbul dalam lingkungan kekuasaan sendiri atau antar konfederasi sendiri dengan konfederasi lain.

Di samping deskripsi tentang bentuk-bentuk organisasi seperti di atas, diberikan pula suatu deskripsi tentang proses pergantian pemimpin. Telah menjadi ketentuan adat, bahwa baik di tingkat klen kecil, di tingkat kampung maupun di tingkat konfederasi kedudukan pemimpin itu dijabat seumur hidup dan selalu dijabat oleh anak laki-laki sulung dari pejabat sebelumnya. Meskipun ada ketentuan demikian, sifat-sifat kemampuan memimpin dan sikap bijaksana merupakan syarat-syarat yang dituntut bagi seorang pemimpin menyebabkan tidak tertutup kemungkinan timbulnya persaingan antara anak-anak laki-laki dan saudara-saudara pemimpin sebelumnya untuk merebut kedudukan pemimpin. Proses-proses yang dilalui untuk mencapai kedudukan *ondoafi* juga diuraikan.

Selanjutnya dijelaskan sumber-sumber yang dijadikan alat pengabsahan kekuasaan seorang *ondoafi*. Orang Sentani percaya, bahwa seseorang *ondoafi*, seperti yang dituturkan lewat mite, adalah simbol dari tokoh leluhur yang hidup di dunia gaib. Oleh karena itu *ondoafi* berperan sebagai mediator antara dunia nyata dengan dunia gaib. Kedudukan demikian menyebabkan *ondoafi* dianggap sakti dan oleh sebab itu mempunyai kekuasaan yang bersifat magis. Di sinilah letak sumber pengabsahan kekuasaan pertama. Berkaitan pula dengan kekuasaan yang bersifat magis itu adalah kewenangan seorang *ondoafi* untuk memegang hak kuasa atas semua sumber-sumber hidup (tanah, hutan dan air) dalam lingkungan kekuasaannya yang disebut *phuke khelahe*. Hak untuk menguasai semua sumber hidup ini merupakan sumber pengabsahan kekuasaan yang lain.

Tipe sistem kepemimpinan politik lain yang dibahas dalam kajian ini adalah sistem kerajaan. Deskripsi tentang itu dimuat dalam bab lima. Bab tersebut terdiri dari tiga sub-bab. Dalam sub-bab pertama diuraikan ciri-ciri tipe sistem kerajaan, selanjutnya dalam

sub-bab dua diberikan suatu gambaran umum tentang suku-suku-bangsa di Irian Jaya yang mengenal tipe sistem kepemimpinan raja dan akhirnya pada sub-bab tiga diuraikan secara terperinci sistem kerajaan di daerah kepulauan Raja Ampat sebagai contoh.

Ciri pertama sistem kerajaan adalah kedudukan pemimpin diwariskan secara primogenitur dalam klen, artinya kedudukan raja diwariskan terutama kepada anak laki-laki sulung, tetapi jika yang bersangkutan belum cukup usia atau tidak mampu memangku jabatan tersebut maka salah seorang adiknya atau salah seorang saudara ayahnya dapat menduduki jabatan tersebut. Kecuali itu ciri tipe sistem kerajaan dapat dilihat pada 'ruang lingkup kekuasaan' yang meliputi wilayah geografi yang lebih luas dengan jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan dengan tipe sistem kepemimpinan lain yang biasanya "ruang lingkup kekuasaan" hanya terbatas pada lingkungan yang lebih kecil dan jumlah penduduk yang sedikit, misalnya terbatas hanya pada satu kampung saja. Segi lain yang merupakan ciri khas tipe sistem kerajaan adalah bahwa sistem ini merupakan hasil proses akulturasi antara kebudayaan-kebudayaan Irian Jaya dan kebudayaan-kebudayaan Maluku, hal itu dapat dilihat terutama pada struktur organisasi dan gelar-gelar yang dipakai oleh para pemimpin.

Dalam sub-bab dua diberikan suatu gambaran umum tentang tempat dan suku-suku-bangsa yang mengenal sistem kerajaan. Tempat-tempat dan suku-suku bangsa yang mendukung sistem kerajaan terdapat pada suatu daerah yang terletak di bagian barat Irian Jaya, mulai dari daerah pesisir Kepala Burung di sebelah barat, melalui daerah pesisir selatan Kepala Burung dan kepulauan disekitarnya melalui jazirah Bomberai ke arah timur hingga di pantai barat Mimika. Daerah ini merupakan suatu daerah transisi budaya antara kebudayaan-kebudayaan Irian di satu pihak dan kebudayaan-kebudayaan Maluku pada pihak yang lain. Berdasarkan letaknya, kerajaan-kerajaan di daerah tersebut digolongkan dalam tiga wilayah geografi. Di wilayah geografi pertama, yaitu Kepulauan Raja Ampat, terdapat empat kerajaan, masing-masing kerajaan Samate, kerajaan Waigeo, kerajaan Misol dan kerajaan Sailolof. Di wilayah geografi kedua, yaitu daerah semenanjung Onin terdapat tiga kerajaan, ialah kerajaan Rumbati, kerajaan Atiati dan kerajaan Fatagar. Melalui pemerintah Belanda pada waktu *pax neerlandica* tiga daerah yang dikuasai oleh kerajaan Rumbati mendapat status "kerajaan" sendiri, ketiga "kerajaan" baru itu adalah Arguni, Sekar dan Wertuar. Selanjutnya wilayah geografi ketiga adalah daerah Kowiai. Di tempat ini terdapat dua kerajaan, ialah kerajaan Kowiai, sering disebut juga kerajaan Namatota dan kerajaan Aiduma.

Dalam sub-bab tiga penulis mendeskripsikan tipe sistem kepemimpinan raja atau sistem kerajaan yang terdapat di daerah Kepulauan Raja Ampat. Deskripsi itu penulis

awali dengan suatu uraian sosio-etnografi umum meliputi keadaan alam, penduduk dan daerah, sistem kepercayaan, sistem matapencaharian hidup, sejarah asal usul, daerah-daerah kekuasaan tiap kerajaan, dan struktur-struktur sosial penduduk.

Daerah Raja Ampat merupakan gugusan kepulauan yang terletak di antara Kepala Burung, Irian Jaya, dan kepulauan Maluku Utara. Di antara gugusan kepulauan itu terdapat empat pulau besar, ialah pulau Waigeo, pulau Salawati, pulau Batanta dan pulau Misol. Di pulau-pulau besar ini terdapat hutan-hutan sagu yang berfungsi sebagai makanan pokok penduduk setempat. Penduduk kepulauan Raja Ampat terdiri dari lima kolektifa etnik atau suku-bangsa. Lima suku-bangsa itu adalah orang Ma'ya, orang Amber, orang Moi, orang Efan dan orang Biak. Oleh karena masing-masing suku-bangsa mempunyai bahasa sendiri maka mereka menggunakan bahasa Ma'ya sebagai bahasa pergaulan umum di antara mereka.

Keterangan tertulis pertama tentang adanya sistem kerajaan di kepulauan Raja Ampat berasal dari Antonio Pigaffeta, seorang pelaut Portugis, pada tahun 1521 AD. Baik keterangan Pigaffeta maupun keterangan-keterangan dari para penjelajah lain yang berkunjung ke daerah ini kemudian hingga akhir abad ke XIX tidak memberikan gambaran lengkap tentang sistem kerajaan, baik mengenai struktur organisasinya maupun asal usul terbentuknya sistem tersebut. Upaya awal untuk mendapatkan gambaran tentang sistem kerajan di Kepulauan Raja Ampat dilakukan oleh F.C. Kamma pada tahun 1930-an. Kegiatan itu kemudian dilanjutkan oleh A.C. van der Leeden (1987) dan para peneliti lain beberapa waktu yang baru lalu. Keterangan-keterangan lisan penduduk yang dikumpulkan dalam kegiatan-kegiatan penelitian itu menjelaskan bahwa sistem kerajaan di kepulauan Raja Ampat didirikan oleh dua tokoh legendaris, satu bernama Kurabesi dan yang satu lagi bernama Fun Mo.

Kurabesi berasal dari daerah Biak-Numfor, tetapi bertempat tinggal di pulau Waigeo, Raja Ampat. Pada suatu saat ia membantu Sultan Tidore berperang melawan Sultan Jailolo, dan menang. Sebagai imbalannya, Kurabesi kawin dengan putri Sultan Tidore yang bernama Boki Tabai dan kemudian menjadi raja di pulau Waigeo. Kurabesi dan Boki Tabai tidak mempunyai anak-anak kandung, pada suatu hari menemukan enam butir telur lalu mereka membawa dan menyimpannya di rumah. Lima butir telur menetas menjadi manusia, empat anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Butir yang keenam tidak menetas tetapi berubah menjadi batu. Tiga dari empat anak laki-laki itulah yang kemudian menjadi raja, satu berkuasa di pulau Waigeo, satu di pulau Salawati, satu di pulau Misol sedangkan yang satu lagi meninggalkan Raja Ampat dan tinggal di tempat yang bernama Kalimuri di pulau Seram.

Tokoh legendaris lain yang dianggap sebagai pendiri sistem kerajaan di Raja Ampat adalah Fun Mo. Fun Mo berasal dari orang Moi, kawin dengan putri raja Waigeo yang bernama Pin Take dan mendirikan pusat kekuasaannya di Sailolof, Salawati Selatan. Tiga dari empat kerajaan yang terdapat di kepulauan Raja Ampat didirikan oleh keturunan Kurabesi seperti tersebut di atas dan satu kerajaan lagi didirikan oleh Fun Mo. Keempat kerajaan itu adalah kerajaan Waigeo, kerajaan Salawati, kerajaan Misol dan kerajaan Sailolof. Uraian terperinci tentang daerah-daerah serta golongan-golongan etnik penduduk yang dikuasai oleh masing-masing kerajaan diberikan juga dalam karangan ini.

Deskripsi selanjutnya adalah tentang struktur organisasi sistem kerajaan dan sumber-sumber pengabsahan kekuasaan. Struktur organisasi kerajaan di Raja Ampat terdiri dari dua bentuk. Bentuk pertama adalah struktur organisasi tingkat pusat. Dalam struktur organisasi pusat terdapat seorang pemimpin yang bergelar raja dan dibantu oleh seperangkat pembantu yang mempunyai tugas dalam bidang tertentu. Para pembantu itu terdiri dari lima orang, masing-masing dengan gelar *jojau*, *sedahsamoro*, *ukum*, *dumlaha* dan *mirino*. Gelar-gelar itu berasal dari sistem kesultanan-kesultanan Tidore dan Ternate di Maluku Utara, tetapi jenis-jenis tugas yang dilaksanakan oleh para pejabat yang menggunakan gelar-gelar itu tidak sama seperti yang terdapat di Maluku Utara.

Tugas seorang *jojau* adalah sebagai pendamping raja untuk menyampaikan pesan-pesan raja kepada rakyat lewat dewan adat dan bertindak sebagai juru bicara untuk menyampaikan kepentingan atau pesan rakyat kepada raja yang disampaikan oleh kepala-kepala adat. Tugas seorang *ukum* adalah menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh dewan adat kepada warga masyarakat yang bersalah. Selanjutnya tugas seorang *dumlaha* adalah mengurus upacara-upacara adat. Seorang *mirino* adalah staf pembantu raja yang khusus bertugas untuk memungut upeti dan sumbangan-sumbangan dari rakyat. Pejabat lain lagi yang bergelar *sedahsamoro* adalah petugas yang bertindak sebagai penghubung antara alam manusia dengan alam gaib. dalam kaitannya itu, ia menjaga keselamatan raja dan keluarganya dari berbagai bahaya dengan menggunakan ilmu sihirnya. Seperti halnya kedudukan raja, posisi para pembantu inipun diperoleh melalui pewarisan, dari ayah kepada anak atau salah seorang saudaranya.

Di samping struktur organisasi pusat tadi, terdapat juga suatu badan berupa dewan adat yang diketuai oleh raja sendiri dan para anggotanya terdiri dari kepala-kepala klen kecil yang berdiam di pusat kerajaan. Dewan adat adalah lembaga kemasyarakatan dengan fungsi merundingkan dan memutuskan secara musyawarah semua

kebijaksanaan sebelum dijadikan keputusan untuk dilaksanakan seperti misalnya pemilihan pemimpin baru.

Bentuk struktur organisasi kedua adalah organisasi di tingkat daerah. Pada tiap kampung (*pnu*) di daerah, raja mengangkat seorang pembantu yang diberi gelar *marinpnu* untuk meneruskan perintah-perintah raja kepada rakyat di daerah. Dengan demikian tugas utama *marinpnu* adalah memungut upeti atau mengerahkan tenaga kerja dari rakyat untuk melakukan tugas tertentu bagi raja di pusat. Seseorang *marinpnu* dibantu oleh para kepala klen kecil yang disebut *ulisio*. Tugas para *ulisio* adalah mengumpulkan upeti atau sumbangan-sumbangan langsung dari rakyatnya yang kemudian diserahkan kepada raja melalui *marinpnu*. Kedudukan *marinpnu* didasarkan atas loyalitas kepada raja. Seseorang *marinpnu* yang lalai menjalankan tugasnya dikenakan sanksi dan diberhentikan dari kedudukannya.

Kajian tentang sistem kerajaan di Raja Ampat menunjukkan bahwa sumber-sumber pengabsahan kekuasaan yang digunakan oleh kerajaan-kerajaan di daerah itu untuk mempertahankan kekuasaannya adalah mitologi, kekerabatan, ekonomi dan agama. Menurut silsilah keturunan raja-raja di Raja Ampat, moyang-moyang pendiri kerajaan-kerajaan itu bukan manusia biasa sebab mereka berasal dari dunia gaib, hal ini menyebabkan raja-raja itu dianggap sakti. Selanjutnya pemusatan kekuasaan pada para anggota keluarga atau kerabat-kerabat terdekat serta pewarisan kedudukan pemimpin dalam klen kecil merupakan alat pengabsahan kekuasaan lain. Monopoli terhadap sumber-sumber perdagangan dan lalu lintas perdagangan juga merupakan alat pengabsahan kekuasaan. Kecuali itu agama juga dianggap sebagai alat pengabsahan kekuasaan sebab para pemeluk agama Islam yang dapat menjadi pemimpin. Pada umumnya para pemimpin yang merupakan kelompok elit dalam masyarakat saja yang boleh memeluk agama Islam.

Di dalam bab enam penulis uraikan tipe sistem kepemimpinan campuran. Dalam tipe sistem kepemimpinan ini terdapat semua sifat-sifat utama yang dijadikan kriteria untuk menggolongkan tipe sistem kepemimpinan tertentu. Di sini seseorang dapat menduduki posisi pemimpin melalui kriteria pewarisan (*ascribed*) maupun melalui kriteria pencapaian (*achievement*). Faktor-faktor yang menentukan tipe sistem politik campuran adalah karena tingkat startifikasi sosial rendah (Mead 1930:156) dan karena situasi dan kondisi setempat (Douglas 1979:26). Pada situasi relatif baik (damai dan makmur), kriteria bagi seorang pemimpin didasarkan atas keturunan, sebaliknya pada situasi penduduk mengalami kesulitan karena bahaya kelaparan, diserang musuh, dilanda

wabah penyakit atau mengalami dekadensi moral karena proses akulturasi, maka kriteria kepemimpinan tidak lagi didasarkan atas keturunan tetapi atas dasar kemampuan. Dalam keadaan demikian individu-individu dengan kecakapan-kecakapan tertentu tampil sebagai pemimpin untuk memimpin masyarakatnya. Berlakulah di sini sifat pencapaian kedudukan pemimpin. Tipe sistem kepemimpinan campuran didukung oleh berbagai golongan etnik yang terdapat di Teluk Cenderawasih dan penduduk di pesisir utara Kepala Burung. Penulis membahas tipe sistem kepemimpinan campuran yang terdapat pada dua suku-bangsa untuk menggambarkan sistem tersebut. Dua suku-bangsa itu adalah orang Biak dan orang Waropen.

Sebelum penulis menguraikan sistem kepemimpinan politik pada dua suku-bangsa tersebut terlebih dahulu diberikan suatu sketsa sosio-etnografi umum dari masing-masing suku-bangsa meliputi aspek-aspek lingkungan alam, keadaan penduduk, bahasa, agama, sistem matapencaharian hidup, struktur sosial dan sejarah kontak mereka dengan dunia luar. Pembahasan khusus tentang sistem kepemimpinan politik pada orang Biak, dalam bab enam, menunjukkan bahwa tiap klen kecil, *keret*, mempunyai seorang pemimpin yang disebut *mananwir keret*. Kedudukan *mananwir keret* bukan didasarkan atas umur, tetapi ditentukan oleh kualitas seseorang seperti misalnya kemampuan memperjuangkan kepentingan anggota klen kecil, kerelaan mengorbankan diri demi kepentingan golongan sendiri, memiliki pengetahuan luas melebihi anggota-anggota lain dalam klen kecil sendiri dan berani serta pandai berbicara di muka umum. Di atas kepala klen kecil (*mananwir keret*), yaitu pada tingkat kampung (kampung merupakan kesatuan politik terbesar yang dikenal orang Biak dan satu kampung biasanya dibentuk oleh beberapa klen kecil, *keret*), terdapat seorang pemimpin yang disebut *mananwir mnu*. Seorang *mananwir mnu* diangkat oleh penduduk kampung berdasarkan dua kriteria, pertama harus berasal dari golongan *keret* pendiri kampung dan kedua berdasarkan kemampuan (Gendt 1955:374). Kriteria terakhir lebih penting sebab seseorang pemimpin klen kecil yang berasal dari klen pendiri kampung jika tidak memenuhi kriteria kedua maka ia tidak diangkat menjadi *mananwir mnu*, meskipun demikian ia tetap mempunyai wewenang untuk mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah dan hasil-hasil hutan yang berada dalam wilayah kekuasaan kampung (Mampioer 1986:7). Biasanya kriteria kemampuan ditentukan oleh situasi dan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan kedudukan *mananwir mnu* dapat diduduki oleh seorang pemimpin perang, *mambri*, atau oleh seseorang yang mempunyai relasi dagang dengan pihak-pihak lain, *manibob*, atau oleh seseorang shaman yang bertindak sebagai mediator, yang disebut *konor* atau

mon. Tugas seorang *mananwir mnu* adalah sebagai koordinator yang mengkoordinasi kepala-kepala *keret* bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk membuat keputusan tertentu yang menyangkut kepentingan komunitas kampung lewat lembaga masyarakat yang disebut *kainkain karkara mnu*. Seorang *mananwir mnu* membuat keputusan berdasarkan kesepakatan bersama, bukan atas kehendak sendiri, dengan demikian sifat *atunomous* atau mandiri yang terdapat pada pemimpin pria berwibawa tidak terdapat pada seorang *mananwir mnu*.

Selanjutnya deskripsi tentang sistem kepemimpinan politik pada orang Waropen menunjukkan bahwa kedudukan pemimpin politik terdapat pada dua tingkat kesatuan sosial, yaitu kesatuan klen yang disebut *da* dan kesatuan pemukiman (kampung) yang disebut *nu*. Seorang pemimpin *da* disebut *sera*. Kedudukan *sera* merupakan kedudukan pewarisan (*ascription*) dan biasanya dijabat oleh anak laki-laki sulung dari pemimpin sebelumnya yang berasal dari cabang klen tertua. Seorang *sera* dibantu oleh kepala-kepala cabang klen yang disebut *manobawa* dan seorang panglima perang, *eso*. Kedudukan kepala-kepala klen kecil juga diwariskan, sedangkan kedudukan panglima perang tidak.

Seorang pemimpin *nu* disebut juga dengan nama yang sama, *sera*. Meskipun unsur keturunan merupakan faktor penting bagi penentuan kedudukan *sera* dalam tingkat klen atau *da*, namun kekuasaan seorang *sera* dalam tingkat *nu* atau kampung ditentukan oleh unsur kualitas dan besarnya jumlah anggota klen. Seorang *sera* yang mempunyai kualitas berorganisasi (terutama mengorganisasikan suatu ekspedisi pengayauan kepala manusia) dan memiliki sifat *kako* atau berani dan berpengetahuan luas tentang adat istiadat (Held 1947:64) yang melebihi para pemimpin klen lain dapat menjadi pemimpin *nu*. Hal ini menyebabkan bahwa sistem kekuasaan pada orang Waropen di tingkat klen bersifat pewarisan sedangkan pada tingkat *nu* atau pemukiman bersifat pencapaian.

Bab enam diakhiri dengan suatu kesimpulan singkat yang menunjukkan bahwa meskipun tipe sistem kepemimpinan politik antara orang Biak dan orang Waropen sama, tetapi sistem yang terdapat pada orang Waropen lebih menyerupai sistem kepemimpinan yang terdapat pada orang Sentani karena syarat pewarisan kekuasaan mendapat tekanan penting, sedangkan sistem yang terdapat pada orang Biak lebih menyerupai sistem kepemimpinan pria berwibawa karena syarat kemampuan pribadi untuk memperoleh kedudukan pemimpin lebih diutamakan.

Bab tujuh yang merupakan bab penutup kajian ini memuat suatu tinjauan umum yang membahas teori-teori kepemimpinan politik di Oseania dan beberapa catatan dari penulis

sendiri terhadap teori-teori itu berdasarkan data etnografi yang disajikan dalam bab-bab sebelumnya dalam karangan ini.

Teori-teori yang dibicarakan itu adalah teori evolusi (Sahlins 1963), teori sistem benda bergengsi atau *prestige good system* (Friedman 1981; 1982), teori dualisme kepemimpinan (Stagl 1971) dan teori *great men* (Godelier (1986). Berdasarkan ruang lingkup kajiannya, keempat teori tersebut dibedakan atas tiga jenis teori: (1) teori makro; (2) teori meso; dan (3) teori mikro. Teori makro adalah teori yang berupaya untuk menjelaskan perkembangan tipe-tipe sistem politik di seluruh kepulauan Oseania. Termasuk dalam teori ini adalah teori evolusi yang diajukan oleh Sahlins (1963) dan teori sistem benda bergengsi yang diajukan oleh Friedman (1981;1982). Selanjutnya teori meso adalah teori yang berupaya menjelaskan perkembangan tipe-tipe sistem politik pada suatu wilayah tertentu di Oseania, seperti misalnya wilayah kebudayaan Melanesia. Termasuk dalam teori ini adalah teori kepemimpinan dualisme yang diajukan oleh Stagl (1971). Selanjutnya teori mikro adalah teori yang berupaya memberikan penjelasan tentang sistem politik pada suatu kebudayaan etnik tertentu, seperti misalnya teori *great men* yang diajukan oleh Godelier (1986) untuk menjelaskan sistem kepemimpinan pada orang Baruya di Papua New Guinea.

Pada umumnya teori evolusi berpendapat bahwa perbedaan dalam sistem-sistem kepemimpinan politik yang terdapat di seluruh Oseania merupakan hasil proses evolusi linear yang menyebabkan masyarakat egaliter di Melanesia dengan sistem pria berwibawa atau *big men* berkembang menjadi masyarakat yang berstratifikasi dengan tipe sistem politik *chief* atau kepala suku seperti yang terdapat di Polynesia dan Mikronesia, melalui suatu tingkat perantara yang disebut sistem bertingkat atau *ranked system*. Menurut Sahlins, proses evolusi itu ditentukan oleh dua faktor utama: perkembangan produktivitas ekonomi yang menyebabkan timbulnya sistem hierarkis dalam masyarakat dan proses adaptasi terhadap lingkungan-lingkungan tertentu.

Beberapa catatan yang diberikan oleh penulis terhadap teori ini ialah, keterangan-keterangan etnografi dari Irian Jaya menunjukkan bahwa sistem kepemimpinan politik yang mendasarkan kekuasaannya atas prinsip pewarisan terdapat bukan saja di Polynesia dan Mikronesia seperti yang dinyatakan oleh Sahlins dan ahli-ahli lain, sebab di Irian Jaya juga terdapat sistem tersebut di samping sistem pria berwibawa yang bersifat pencapaian. Bertalian dengan itu pula faktor perkembangan produktivitas teknologi yang dianggap sebagai sumber penyebab timbulnya sistem hierarkis tidak dijumpai pada masyarakat pendukung sistem kepemimpinan dengan prinsip pewarisan di Irian Jaya. Orang Sentani yang menganut sistem pewarisan kedudukan tidak

memperlihatkan produktivitas teknologi yang lebih tinggi dari suku-suku-bangsa lain di Irian Jaya yang mendukung tipe-tipe sistem kepemimpinan lain.

Selanjutnya teori sistem benda bergengsi (*prestige good system*) berpendapat bahwa di daerah-daerah di mana benda-benda bergengsi dimonopoli golongan-golongan tertentu saja untuk kepentingan ekonomi atau sosial menyebabkan timbulnya struktur hierarkis dalam masyarakat dengan suatu sistem kepemimpinan yang bersifat pewarisan, keadaan seperti ini terdapat terutama di Polynesia dan Mikronesia. Sebaliknya di daerah-daerah di mana hak monopoli terhadap benda-benda bergengsi kurang karena persaingan yang ketat antara golongan atau antara individu menyebabkan terjadinya suatu bentuk masyarakat yang sifatnya egaliter dengan sistem kepemimpinan pria berwibawa, *big men*, keadaan seperti ini terdapat terutama di pulau New Guinea (Friedman 1981:281-285).

Dalam kaitannya dengan teori tersebut, beberapa catatan yang dapat ditarik dari studi ini ialah, bahwa dalam tipe sistem kepemimpinan *ondoafi*, golongan penguasa memonopoli sumber-sumber daya dan harta-harta bernilai tinggi dalam masyarakat dan menjadikannya alat pengikat sekaligus alat pengabsahan kekuasaan. Dengan demikian teori sistem benda bergengsi berlaku pada sistem kepemimpinan *ondoafi* dengan prinsip pewarisan kedudukan. Sebaliknya data etnografi dalam kajian ini tidak menunjukkan adanya hubungan antara teori sistem benda bergengsi dengan tipe kepemimpinan pria berwibawa. Dalam lima suku-bangsa yang dijadikan contoh dalam kajian ini ditunjukkan bahwa sistem pria berwibawa yang mereka kenal bukan merupakan hasil dari suatu sistem persaingan yang muncul karena hilangnya sistem monopoli, seperti yang dikonsepsikan dalam teori sistem benda bergengsi.

Dalam teori kepemimpinan dualisme dikemukakan dua hal yang menjadi faktor penyebab adanya perbedaan prinsip dalam sistem kepemimpinan politik di daerah kebudayaan Melanesia. Pertama, perbedaan itu disebabkan oleh bentuk sistem kesatuan sosial. Bahwa pada masyarakat yang menganut sistem lineage segementer tidak terdapat perbedaan kedudukan antara tokoh-tokoh tua dengan pemimpin pria berwibawa. Sebaliknya pada masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok lineage yang korporatif (*corporate lineage*), terdapat perbedaan yang nyata antara kedudukan yang bersifat pewarisan dan yang bersifat pencapaian. Sebagian besar masyarakat Melanesia memiliki sistem kepemimpinan yang berada di antara dua ekstrem tersebut di atas (Stagl 1971:378). Kedua, perbedaan itu ditentukan oleh keadaan banyak atau sedikitnya jumlah penduduk. Stagl berpendapat bahwa dalam masyarakat yang jumlah penduduknya banyak terdapat sistem kepemimpinan yang relatif tersentralisasi dan

bersifat despotis, sedangkan masyarakat dengan jumlah penduduk sedikit terdapat masyarakat egaliter pemburu dan peramu dengan kepemimpinan yang bersifat marginal, artinya tidak ada perbedaan peranan antara tokoh-tokoh tua dan pemimpin pria berwibawa. Penduduk Melanesia berada di antara kedua ekstrem tersebut, jadi di sini terdapat peranan yang berbeda antara tokoh-tokoh tua dan pemimpin pria berwibawa (Stagl 1971:378-379). Keterangan etnografi dalam kajian ini menunjukkan bahwa teori kepemimpinan dualisme seperti tersebut di atas hanya terdapat pada tipe sistem kepemimpinan campuran, jadi pada orang Biak dan orang Waropen, tidak pada suku-suku bangsa lain yang mendukung tipe-tipe sistem kepemimpinan *ondoafi*, kerajaan atau pria berwibawa. Tokoh-tokoh tua dalam sistem pria berwibawa penting karena berperan sebagai penasihat, tetapi keputusan terakhir selalu dibuat oleh pemimpin pria berwibawa. Sebaliknya dalam tipe sistem kepemimpinan politik campuran keputusan dibuat bersama-sama dengan tokoh-tokoh tua melalui musyawarah dalam lembaga kemasyarakatan seperti *kainkain karkara mnu*, misalnya pada orang Biak.

Teori *great men* yang diajukan Godelier berdasarkan studi etnografi orang Baruya, menunjukkan bahwa ada dua cara untuk mendapat kedudukan pemimpin dalam masyarakat. Cara pertama adalah melalui pewarisan. Sistem pewarisan kedudukan ini terdapat pada para pemimpin upacara ritual, sedangkan sistem pencapaian kedudukan terdapat pada para pemimpin perang. Di antara dua pemimpin ini tidak ada perbedaan hierarkis, kedua-duanya menduduki tingkat kedudukan yang sama. Perbedaan yang ada tergantung dari keberhasilan masing-masing pemimpin untuk melindungi atau meyelamatkan para warga masyarakatnya dari suatu malapetaka atau krisis yang sedang mengancam atau melanda mereka (1986:80). Selanjutnya teori ini berpendapat bahwa kekayaan tidak memberi kekuasaan kepada pemiliknya, demikian pula kekuasaan tidak menjamin kekayaan bagi diri seseorang. Faktor utama yang menyebabkan adanya sistem kepemimpinan *great men* terdapat pada prinsip yang mengatur aspek sosial dari reproduksi hidup masyarakat. Persekutuan antar kelompok dan jaminan kelanjutan hubungan persekutuan serta pembiakan kelompok hanya dilakukan lewat pertukaran perempuan atau kawin tukar, bukan manipulasi kekayaan atau kekuasaan (Godelier 1986:xi).

Data etnografi yang disajikan dalam kajian ini menunjukkan bahwa unsur-unsur kekayaan dan kekuasaan pada suku-suku bangsa yang dijadikan contoh selalu dijadikan sumber pengabsahan kekuasaan politik bagi diri seseorang atau untuk golongan tertentu, tidak seperti yang terdapat pada orang Baruya yang dideskripsikan oleh Godelier.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari semua yang diuraikan di atas adalah bahwa bermacam-macam tipe kepemimpinan yang dikenal baik di daerah Irian Jaya saja, maupun di seluruh daerah Oseania tidak dapat dijelaskan asal usul perkembangannya hanya melalui satu teori. Banyak faktor yang menyebabkan berkembangnya anekaragam dan variasi dalam sistem-sistem politik di Oseania.

